

	SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman	
	Vol. 1 No. 2 (2022)	E-ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

PERJANJIAN MALINO SEBAGAI HASIL DARI UPAYA MEDIASI KONFLIK DI KONFLIK MALUKU

Bagus Budi Sajiwo, Zidan Hanifuddin Marfai
Bagusbudisajiwo@gmail.com

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstract

Conflict can be interpreted as conflict, dispute, or conditions that are not in accordance with what they should be, conflict is usually accompanied by violence, but it is undeniable that there are conflicts that are not accompanied by violence. In Indonesia, conflict is not something new, it even occurs relatively often, this is because Indonesia is a pluralistic/multicultural country, with that difference Indonesia is prone to conflict. Like the conflict in Maluku in 1999. After the outbreak of the reformation event, it provided an opportunity for certain groups in Maluku to vent their grudges that had been buried so far. The Maluku conflict went on for a long time and claimed many lives. This study aims to find out how the Malino Agreement is an effort of conflict mediation in this complex Maluku conflict.

Keywords: *conflict, maluku, Malino Charter*

Pendahuluan

Maluku adalah daerah yang memiliki penduduk heterogen. Sejak jaman dahulu Maluku merupakan daerah yang banyak menghasilkan rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, oleh karena itu Maluku menjadi incaran para bangsa-bangsa kolonial Eropa. Akibat dari hal itu pemerintah kolonial menjadikan Maluku sebagai penetrasi, baik secara sosial keagamaan (Kristen dan Islam) maupun secara politik, hal ini menyebabkan terjadinya konflik diantara masyarakat Maluku. Segregasi yang sudah ada sejak lama itu tetap berlangsung dan justru menguat setelah rezim orde baru. Baik dari elit agama maupun elite politik tidak mampu untuk menyelesaikan/menyatukan

masyarakat, sehingga menjadikan konflik Maluku menjadi konflik yang berkepanjangan (Elewehan, dkk, 2019).

Pasca meletusnya peristiwa reformasi tahun 1998 yang telah menyebabkan kekacauan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini menyebabkan lemahnya negara dalam mengontrol keamanan masyarakatnya, sehingga pecah lah konflik Maluku tahun 1999, menurut sebagian orang Maluku, konflik ini merupakan konflik yang bersentimen keagamaan antara Kristen dan Islam. Konflik ini merupakan mata rantai panjang dari adanya ketidakadilan dan peminggiran masyarakat akibat dari kebijakan pemerintah rezim sebelumnya.

Konflik Maluku dimulai pada 19 Januari 1999 yang berlangsung selama beberapa tahun. Konflik ini mengakibatkan banyak kerusakan, penderitaan, pemaksaan atau konversi agama dan kematian. Konflik ini menjadi catatan sejarah yang sangat buruk dan kelam bagi Negara Indonesia (Waileruny S, 2010). Dibawah rezim orde baru, wilayah Maluku memang menjadi salah satu daerah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Maluku dan Maluku Utara menjadi fokus utama pemerintah setelah era orde baru (era reformasi) meliputi isu-isu kepentingan elit lokal, agama dan konflik etnis. Konflik ini pecah berawal dari kelompok etnis kemudian berkembang menjadi konflik antar agama yaitu Kristen dan Islam. Awalnya hanya berbentuk kerusuhan terbatas, namun berkembang dan berlanjut menjadi kerusuhan sporadic yang melibatkan etnis tertentu dan berakhir menjadi konflik antar agama Kristen dan islam (Waileruny S, 2010).

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi di Maluku dan bagaimana Perjanjian Malino sebagai hasil instrument resolusi konflik yang dilakukan untuk mendamaikan masyarakat Maluku yang terlibat di kerusuhan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Menurut Suparlan (2014) metode kualitatif biasa disebut sebagai metode humanistic, karena cara pandang dan cara hidup, ungkapan emosi, selera, serta keyakinan dari masyarakat yang akan diteliti relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang ada, seperti jurnal, buku, internet dan lain sebagainya. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan cara mencari data mengenai variable atau hal-hal yang dapat berbentuk tulisan, biografi, kebijakan, dan lain sebagainya. Untuk analisis data menggunakan teknik deskriptif dan naratif sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

a. Kronologi konflik di Maluku

Konflik di Maluku berlangsung selama beberapa tahun, dimulai pada tanggal 19 Januari 1999. Para pengamat berpendapat bahwa setidaknya ada enam indikator yang mengarah pada konflik Maluku, yang pertama karena adanya kenakalan remaja atau murni dari kriminalitas, yang kedua karena

adanya penempatan pegawai di kantor gubernur Maluku dan perguruan tinggi hanya dari golongan atau kelompok tertentu dan dari daerah tertentu saja, yang ketiga karena adanya upaya dari partai PDIP untuk memenangkan pemilu, yang keempat karena adanya kecemburuan sosial di masyarakat adat Maluku terhadap para pendatang yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi, yang kelima sebagai konflik antar kelompok agama Kristen dan Islam, yang keenam adanya akibat dari upaya kelompok RMS (Republik Maluku Selatan) yang ingin memisahkandiri dari wilayah NKRI (Waileruny, S, 2010).

Menurut saksi yang ada di Ambon, provokator dalam insiden kekerasan pertama di Ambon merupakan sekelompok massa, pada bulan Desember 1998, terjadi serangan pembakaran dan pertempuran antara desa-desa Muslim dan Kristen di beberapa wilayah di Ambon, yang sering dipicu oleh tentara Indonesia. Pada tanggal 14 Januari 1999, terjadi kerusuhan di Dobo, Maluku Tenggara. antara umat Kristen dan umat Islam. Yang menjadi pemicu inti dari konflik di Ambon adalah saat peristiwa yang terjadi pada hari Raya Idul Fitri pada tanggal 19 Januari 1999. Perselisihan kecil yang terjadi antara pemuda Kristen yang berasal dari daerah Mardika Ambon dan pemuda Muslim yang berasal dari Batumerah (sebuah desa yang dekat dengan Mardika), isu-isu yang disebarkan memperburuk perpecahan yang ada antara kaum Kristen dan kaum muslim. Pada awalnya pertempuran hanya terjadi antara orang Kristen Ambon yang mana merupakan penduduk asli Ambon dengan Pendatang Muslim dari Sulawesi Selatan (Bugis, Buton, dan Makassar) (Buchanan, C, 2011).

Berbeda dengan konflik yang ada di Ambon, konflik yang ada di Maluku Utara relatif berlangsung singkat. Peta konflik yang terjadi di Maluku Utara dari tahun 1999 sampai 2001 merupakan jaringan simpang siur yang terjadi di berbagai daerah, yang tidak ada titik masalah sama sekali, semua konflik terjadi karena pengaruh dari konflik yang ada di Ambon sebelah selatan yang sudah berkecamuk sejak bulan Januari 1999. Di Ternate, terdapat beberapa konflik antara orang Kristen dengan orang muslim, tetapi ada juga yang tidak (Van Klinken, 2007).

Terdapat empat tahap konflik yang terjadi di Maluku, yang pertama, pada bulan Agustus 1999 konflik terjadi di pusat Halmahera, antara penduduk asli Kao yang mana adalah campuran antara Muslim Kristen dan imigran Muslim dari Makian, yang kedua terjadi pada bulan Oktober 1999, Muslim dari Makian kembali diserang dan akhirnya melarikan diri ke Ternate terdekat, para kelompok muslim lainnya tersentuh atas penderitaan orang muslim Makian, dan akhirnya mereka menyerang orang-orang Kristen di Ternate, dan kemudian melarikan diri ke daerah- daerah Kristen yang ada di tempat lain. Hal ini mengakibatkan konflik yang tadinya terjadi antara etnis lokal berkembang menjadi konflik agama provinsi, yang ketiga kejadian itu memicu terjadinya pertempuran antara Muslim dan Kristen di wilayah Kristen fanatik di utara Tobelo pada bulan Desember 1999, yang keempat ketika konflik ini berkembang menjadi pertempuran tiga hari di pusat politik Ternate mulai tanggal 28 Desember, pertempuran bukan lagi antara muslim dan Kristen,

melainkan antara muslim dengan muslim (Van Klinken, 2007).

b. Faktor-faktor penyebab konflik Maluku

Konflik muncul pasti karena ada latarbelakang atau sebab akibat sehingga konflik itu ada, hal ini biasanya dinamakan faktor konflik, begitupun dengan konflik yang terjadi di Maluku, terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik ini. Konflik Maluku ini bukan hanya semata-mata karena adanya faktor perbedaan agama saja, melainkan beragam motif dan tujuan yang menjadi faktor terjadinya konflik di Maluku ini. Menurut Rudiansyah (2019) banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik, faktor tersebut antara lain, Pertama, dimensi ekonomi (stratifikasi sosial), perekonomian memegang peran penting dalam faktor yang memicu konflik, hal ini wajar karena ekonomi merupakan unsur yang utama dalam kehidupan manusia, ekonomi akan membentuk kehidupan sosial yang memiliki jenjang atau hierarki sosial (sistem stratifikasi sosial) dalam masyarakat.

Kedua, dimensi kebudayaan, agama merupakan unsur penting dalam pembentukan kebudayaan, banyak terdapat perbedaan antara agama satu dengan agama yang lain, perbedaan tersebut tercermin dalam perbedaan sistem, nilai, dan norma masyarakat. ketiga, adalah dimensi politik, kepentingan dan keberadaan elit politik menyebabkan perselisihan antara dua kelompok yang menjadi sasaran manipulasi politik, yang terjadi di Maluku merupakan wujud dari politik etnis yang sedang terjadi. Keempat, adalah dimensi diferensiasi ras dan etnis, Indonesia merupakan Negara yang

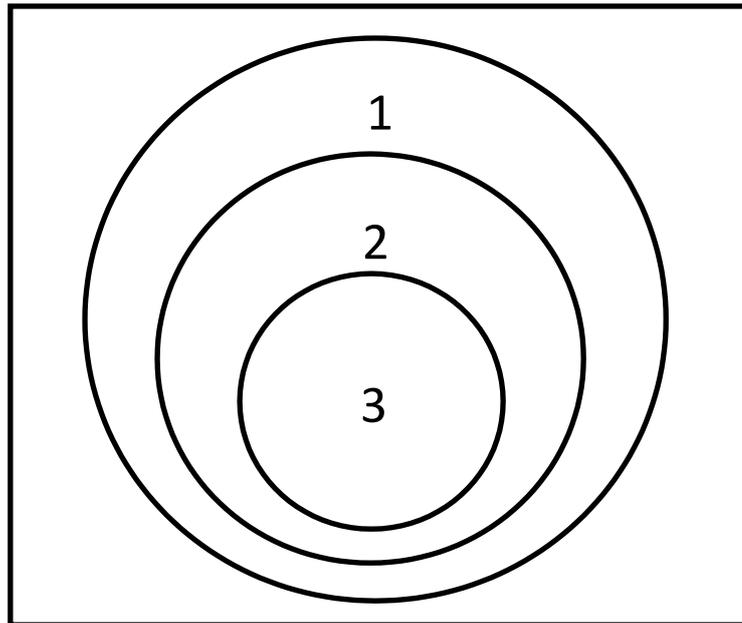
majemuk, dengan beragamnya suku, ras, dan etnis menyebabkan kemungkinan munculnya gesekan-gesekan antar etnis, suku, ras yang ada.

Kelima, adalah dimensi diferensiasi agama, perbedaan agama dapat menjadi sangat rapuh karena dapat menjadi bibit-bibit perpecahan, sikap intoleransi dan fanatik yang menyebabkan kurangnya rasa saling menghormati antar pemeluk agama lain sehingga menimbulkan konflik dan perpecahan.

Konflik yang terjadi di Maluku merupakan konflik yang melibatkan antara etnis atau suku yang ada. Primordialisme kesukuan menyebabkan awal terjadinya konflik, dimulai dari perkelahian individu antara orang ambon yang mempunyai agama Kristen dan Islam, karena perbedaan etnis, konflik berubah menjadi konflik agama yang mengidentikkan dengan identitas agama dan kelompok sosial kedua individu (Ismail, 2021).

Jika kita analisis menggunakan diagram bawang (ring onion), maka faktor konflik yang terjadi di Maluku adalah sebagai berikut:

Gambar I. Diagram Bawang (onion rings)



Keterangan:

1. Merupakan kulit terluar atau dalam hal ini merupakan faktor yang muncul di permukaan atau faktor yang terlihat, dalam konflik Maluku faktor yang terlihat sebagai penyebab konflik adalah faktor agama, yaitu antara agama Kristen dengan agama Islam.
2. Lapisan kedua merupakan faktor yang tertutup oleh faktor yang terlihat, biasanya faktor ini jarang diketahui oleh masyarakat umum, dalam konflik di Maluku, faktor ini disebabkan oleh adanya sentiment etnis atau suku yang ada di Maluku, yaitu suku asli Maluku (penduduk asli ambon) dengan masyarakat pendatang (Bugis, Buton, dan Makassar)
3. Dan lapisan yang terdalam adalah lapisan inti atau biasa disebut akar dari permasalahan, biasanya faktor yang muncul karena

adanya sistem atau struktur yang ada di Negara, atau bisa juga karena faktor ekonomi, dalam konflik di Maluku, sudah lama masyarakat menaruh dendam terhadap pendatang, sejak orba runtuh, maka meletuslah konflik tersebut, salah satunya juga karena adanya faktor kecemburuan sosial akan perekonomian yang dicari untuk memenuhi kebutuhan hidup.

c. Perjanjian Malino Sebagai Upaya Resolusi Konflik di Maluku

Ketika konflik terjadi, semua pihak tentu berusaha untuk mencari cara agar dapat menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik dengan alternatif terbaik. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu dengan cara persuasif dan cara koersif. Penyelesaian konflik dengan cara persuasif adalah dengan menggunakan negosiasi dan musyawarah agar saling menemukan titik temu diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik berunding dengan didampingi pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah atau mediator, cara penyelesaian konflik dengan persuasif ini berorientasi pada ketuntasan atau terselesaikannya masalah yang berarti kedua belah pihak yang berkonflik berdamai dan memiliki rasa saling memaafkan dan menerima tanpa ada rasa dendam.

Kemudian yang kedua adalah penyelesaian konflik dengan cara koersif, dengan cara koersif ini berarti cara menggunakan kekerasan fisik, intimidasi

pihak lain, sehingga pihak yang di intimidasi dapat berubah sesuai dengan kemauan pihak lain dan menyetujui pendapatnya dengan terpaksa, cara ini tidak efektif karena tidak sepenuhnya terselesaikan dan masih ada rasa untuk membalaskan perbuatan yang dapat berujung pada munculnya konflik kembali.

Dalam kasus konflik di Maluku, cara penyelesaian yang digunakan adalah dengan cara persuasif, dengan yang terlibat adalah pemerintah pusat dan daerah, petugas keamanan, masyarakat lokal dan kelompok perempuan, serta ada LSM Internasional dan nasional. Pemerintah pusat mendorong untuk melakukan negosiasi damai antara komunitas Kristen dan komunitas Islam dalam sebuah deklarasi atau perjanjian, sebelumnya pemerintah berkali-kali berupaya untuk menyelesaikan konflik namun semuanya gagal, seperti gubernur Maluku membentuk kelompok informal untuk para pemuka agama pada Januari 1999 yang disebut Tim 6, dalam kelompok ini terdiri dari enam pemimpin agama yang terdiri dari komunitas Kristen, Protestan, dan Muslim, tugas mereka adalah untuk mencegah agar tidak terjadi perusakan terhadap rumah-rumah ibadah serta mencegah meluasnya konflik kekerasan di Ambon, Tim yang sudah dibentuk gagal menjalankan tugasnya karena tim yang seharusnya melaksanakan tugasnya justru ikut terlibat dalam konflik dan tindak kekerasan.

Pada Februari 2002 di Malino, sebuah kota kecil di punggung bukit Sulawesi Selatan, berkumpul 70 warga Maluku bersama dengan pemerintah untuk

bertemu, mereka melakukan perjanjian atau deklarasi untuk sepakat mengakhiri konflik kekerasan yang sudah berlarut-larut. Malino sebagai tonggak sejarah yang menjadi titik balik dari konflik peperangan menjadi damai. Perlu diingat bahwa pemerintah yang bertanda tangan bukan hanya sebagai pihak ketiga yang bergembira ketika dua kelompok yang bertikai akhirnya berdamai, melainkan juga sebagai pembuat perjanjian, dalam Perjanjian Malino II yang mengikat semua pihak, yaitu masyarakat Islam, Kristen Maluku serta pemerintah (Elewahan, dkk, 2011).

Dalam rangka untuk membuat perjanjian, Menteri Koordinator Urusan Politik dan Hukum, Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jusuf Kalla yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat meminta gubernur Maluku untuk memilih perwakilan dari semua komunitas muslim dan Kristen, 34 orang Kristen dan 35 orang Muslim berkumpul selama tiga hari di Malino.

Lebih dari tiga tahun konflik berkecamuk, merugikan semua pihak dan membahayakan keutuhan NKRI, Maluku bersama dengan pemerintah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Malino, Perjanjian Malino terdiri dari 11 poin, yaitu sebagai berikut:

1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan kekerasan
2. Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak memihak, dengan dukungan seluruh masyarakat, aparat penegak hukum harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas.

3. Menolak, menentang dan menindak segala bentuk gerakan separatism yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI.
4. sebagai bagian dari NKRI, masyarakat Maluku berhak untuk berada, bekerja dan berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia, begitu pula sebaliknya, masyarakat Indonesia lainnya dapat berada, bekerja dan berusaha di wilayah provinsi Maluku secara sah dan adil menjunjung tinggi kemajemukan dengan mengindahkan budaya setempat.
5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau lascar bersenjata tanpa izin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku wajib meninggalkan Maluku.
6. Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.
7. Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan kembali dan keluar dari kesulitan.

Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.

9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.

10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk agama Kristen dan Islam maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan.

11. Mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

Setelah perjanjian itu dibuat, maka segera ditandatangani oleh pihak- pihak yang terlibat, berikut pihak yang terlibat dalam Perjanjian Malino:

Tabel I. Pihak-Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Malino

No	Pihak Pemerintah	Pihak Peninjau
1.	Jusuf Kalla (Menko Kesra)	Prof. Dr. Din Syamsuddin

		(Sekum MUI)
2.	Da'I Bachtiar, S.H. (KAPOLRI)	Dr.I.P.Lambe (Sekum PGI)
3.	Ir. M. Saleh Latuconsina (Gubernur Maluku)	Mayjen. Bambang Soetedjo (Deputi Poldagri)
4.	Drs. Soenarko D. A. (KAPOLDA Maluku)	Dr. Mulyani A. Nurhani (Irjen DEPDIKNAS)

Menurut Jusuf Kalla, agar dapat menyelesaikan konflik, hal terpenting dan yang pertama dilakukan yaitu menggali atau mengenali kepribadian para tokoh yang sedang berkonflik, menggali informasi sebanyak mungkin, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi penting karena mereka dipercaya oleh masyarakat. media yang digunakan sebagai alat untuk membangun perdamaian juga memiliki peran yang penting, beberapa contoh media yang digunakan sebagai alat perdamaian selama konflik berlangsung antara lain Gerakan Damai Baku Bae dengan meningkatkan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya untuk mengakhiri konflik di Ambon dan juga membuat pelatihan bagi para jurnalis perdamaian yaitu membuat Maluku Media Center (MMC) (Lindawaty, 2011).

Jika kita lihat dari sistem kekerabatan di Ambon yang menjadi faktor penting terciptanya integritas sosial, pada umumnya perbedaan agama di

Ambon tidak terlalu kuat dibandingkan dengan kekuatan ikatan kekerabatan dengan sistem patrilineal. Dalam satu keluarga dapat menganut agama yang berbeda, tetapi mereka tetap menjalankan agama yang dianutnya dengan tenang, sehingga pada hakikatnya *pela gandong* sudah mengandung unsur rekonsiliasi¹, *pela gandong* merupakan ikatan perjanjian oleh dua desa baik yang berbeda agama berdasarkan darah garis keturunan dua atau lebih desa di Ambon (bakri, 2015). Nilai budaya yang sudah mengakar kuat sejak lama di dalam kehidupan masyarakat Ambon dapat menjadi modal yang besar untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan juga menjadi penyemangat dalam membangun hidup kembali daerah yang terkena konflik. Hubungan budaya dan kekerabatan adat harus terus didorong dan dijaga agar menciptakan sinergitas yang baik dalam upaya membangun masa depan Ambon yang cerah dan aman.

Kesimpulan

Terdapat empat tahap konflik yang terjadi di Maluku, yang pertama, pada bulan Agustus 1999 konflik terjadi di pusat Halmahera, antara penduduk asli Kao yang mana adalah campuran antara Muslim Kristen dan imigran Muslim dari Makian, yang kedua terjadi pada bulan Oktober 1999, Muslim dari Makian kembali diserang dan akhirnya melarikan diri ke Ternate terdekat, para kelompok muslim lainnya tersentuh atas penderitaan orang muslim Makian, dan akhirnya mereka menyerang orang-

¹ Istilah *pela gandong* berasal dari kata 'pela' - 'pila' yang berarti mengamankan, menguatkan, dan mengusahakan sesuatu benda agar tidak mudah pecah atau rusak. Sedangkan 'gandong' berarti berasal dari Rahim yang sama. Mereka percaya memiliki leluhur yang sama.

orang Kristen di Ternate, dan kemudian melarikan diri ke daerah-daerah Kristen yang ada di tempat lain. Hal ini mengakibatkan konflik yang tadinya terjadi antara etnis lokal berkembang menjadi konflik agama provinsi, yang ketiga kejadian itu memicu terjadinya pertempuran antara Muslim dan Kristen di wilayah Kristen fanatik di utara Tobelo pada bulan Desember 1999, yang keempat ketika konflik ini berkembang menjadi pertempuran tiga hari di pusat politik Ternate mulai tanggal 28 Desember, pertempuran bukan lagi antara muslim dan Kristen, melainkan antara muslim dengan muslim.

Faktor yang melatarbelakangi konflik ini terjadi dapat dibagi menjadi lima, yaitu Pertama dimensi ekonomi (stratifikasi sosial). Kedua, dimensi kebudayaan. Ketiga, adalah dimensi politik, kepentingan dan keberadaan elit politik. Keempat, adalah dimensi diferensiasi ras dan etnis. Kelima, adalah dimensi diferensiasi agama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Maluku ini, hingga akhirnya tercetuslah Perjanjian Malino, yang difasilitasi pemerintah pusat, dengan menghadirkan 34 perwakilan dari Kristen dan 35 perwakilan dari Islam di sebuah kota kecil di punggung bukit Sulawesi Selatan, yang bernama Malino. Dalam perjanjian ini menghasilkan 11 butir pernyataan yang mana semua pihak tak terkecuali pemerintah wajib untuk menaati perjanjian tersebut, hal ini karena demi menciptakan perdamaian dan ketentraman masyarakat Maluku seperti pada awal mulanya.

Daftar Pustaka

C, Buchanan. "Pengelolaan Konflik Di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik Di Maluku, Papua, dan Poso." *Centre For Humanitarian Dialogue*. 2011.

- D, Rudiansyah. "Dimensi Sosiopolitik Konflik Ambon." 2019.
- G, Van Klinken. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- H, Bakri. "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon." *Jurnal Magister Ilmu Politik*. 1(1). 2015.
- Jerry Indrawan, Ananda Tania Putri. "Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol,4 No,1.
- Jumaidi Elewahan, dkk. "Konflik Maluku dan Pelaksanaan Perjanjian Malino." *Jurnal Kajian, Penelitian, & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol.4, No.2. 2019.
- P, Suparlan. *Konflik Sosial Dan Alternatif Pemecahannya*. *Antropologi Indonesia*. 2014.
- R, Ismail. "Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Keagamaan Ambon." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*. Vol.3. 2021.
- S, Lindawaty D. "Konflik Ambon: Kajian Terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya." *Politica*. 2(2). 2011.
- Waileruny, S. *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.